KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pencabutan Nama Soeharto dari Tap MPR Tuai Kritik
Tanggal : Jumat, 27 September 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pencabutan Nama Soeharto dari Tap MPR Tuai Kritik

JAKARTA, KOMPAS — DPR kian serius menambah jumlah komisi di parlemen. Keinginan menambah, dari 11 komisi yang ada saat ini, muncul sebagai imbas dari rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, penambahan komisi di DPR menunggu jumlah menteri di kabinet mendatang.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, wacana penambahan komisi DPR sudah melalui kajian dan tinggal menunggu pematangan konsep. Hal tersebut bergantung pada jumlah menteri yang tengah digodok oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Oleh karena itu, Puan belum bisa menjelaskan jumlah dan komisi apa saja yang akan ditambah.

"Sudah dikaji, kami akan mematangkan nanti setelah presiden terpilih nantinya mematangkan kira-kira berapa kementerian yang akan dipertimbangkan, dan dipastikan berapa kebutuhannya. Tentu saja DPR akan menyesuaikan," ucap Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Penambahan komisi, menurut Puan yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), bakal dilakukan sesuai aturan. Namun, dia masih enggan menjelaskan aturan apa yang dimaksud. Meski demikian, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyatakan DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Sebelumnya, Rabu (25/9), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, penambahan jumlah komisi tak perlu melalui revisi UU MD3. Sebab perubahan atau penambahan komisi di DPR bisa dilakukan cwat aturan tata tertib DPR.

"Sebetulnya tidak harus mengubah MD3, ya," ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, menteri kabinet Prabowo masih dalam proses penggodokan. Segala sesuatu yang beredar di publik tetap ada kemungkinan untuk berubah, termasuk soal penggabungan, pemisahan, dan pembentukan kementerian baru.

Konsep matang kabinet

Meski demikian, dia memastikan konsep matang kabinet Prabowo bakal selesai sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, 20 Oktober 2024. "Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika. Bisa ada bisa enggak itu tergantung nanti finalisasi yang kemudian akan difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," ujar Dasco.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, banyaknya kementerian dan lembaga membutuhkan penambahan komisi di DPR. Beban kerja DPR untuk bermitra dengan pemerintah tidak cukup diemban 11 komisi saja. Adapun jumlah komisi nanti akan bergantung pada lobi-lobi setelah DPR periode 2024-2029 dilantik.

Sementara itu, Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Wahyudi Kumorotomo, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (26/9), berpendapat, rencana Prabowo menambah jumlah kementerian setelah revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara disahkan menjadi undang-undang pada pekan lalu akan berdampak buruk bagi efektivitas tata kelola pemerintahan.

"Jadi, pasti koordinasinya akan lebih sulit. Yang kedua, penambahan ini juga membebani anggaran," ucap Wahyudi.

Menurut Wahyudi, penambahan jumlah kementerian pasti akan berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional pemerintah, yakni kementerian dan lembaga, sehingga akan menjadi pertanda buruk bagi keuangan negara. Rencana penambahan komisi DPR juga dapat dianggap sebagai kesempatan bagi DPR untuk bagi-bagi kekuasaan. (WIL/DYT)